

SETELAH 205 TAHUN REFORMASI ADMINISTRASI

Kuliah Umum Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya, 12 November 2015

Oleh: Samodra Wibawa

[<http://samodra.staff.ugm.ac.id>]

Pondasi negara modern di Indonesia dibangun oleh Herman Willem Daendels (Belanda-Perancis) pada 1807 – 1810. Pengacara yang berpangkat marsekal di bawah Napoleon ini membangun negara baru dengan ciri: hierarkhie seperti militer, pemerintah bekerja berdasar peraturan/hukum, sistem pajak dan keuangan terpusat. Dia pun berusaha memberantas korupsi, menghentikan bisnis pribadi para pejabat dan memperbaiki kemerosotan moral mereka.

40-an tahun berikutnya, 1854, barulah disusun “UUD” Hindia Belanda (oleh pemerintah Belanda di Eropa sana). Struktur jabatan di “negara” Hindia Belanda adalah: gubernur jenderal, residen, asisten residen dan *controleur* di bagian atas dan regent/bupati, wedono, camat dan lurah di bagian bawah. Tentu saja struktur ini sangat sentralistik dan otokratik, karena tidak ada lembaga wakil rakyat di dalamnya. Dengannya berlangsunglah eksploitasi sumberdaya alam dan penduduk Hindia Belanda (untuk kemakmuran Belanda di Eropa).

50-an tahun berikutnya, awal 1900-an, dilakukanlah reformasi kehidupan bernegara di Hindia Belanda. Tidak melalui proses politik yang gaduh, melainkan senyap (dan beradab?): kaum liberal dan humanis di Belanda mendesakkan perbaikan kualitas hidup penduduk Hindia Belanda: peningkatan/perintisan pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, pertanian, perbankan, transmigrasi), demokratisasi (kebebasan berorganisasi dan berpendapat serta keterwakilan rakyat dalam pemerintahan) dan desentralisasi pemerintahan karesiden dan kota.

50-an tahun sesudahnya pemerintah RI berusaha menguatkan/menegaskan status “modern” dari negara RI, yaitu negara yang dikelola berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), bukan berdasar kekuasaan (*Machtstaat*). Pemerintah melakukan rasionalisasi birokrasi: meritokratisasi, perampingan (*downsizing*, *rightsizing*), penegakan disiplin, peningkatan ketekunan, ketelitian dan semangat kerja (dan memberantas korupsi).

Kabinet Ali Sastroamidjojo (Agustus 1953 – Agustus 1955) memiliki dua program: “(a) Menyusun aparatur pemerintah yang efisien serta pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf kehidupan pegawai; dan (b) Memberantas korupsi dan birokrasi” (?). Dibentuklah PANOK: Panitia Negara untuk menyelidiki Organisasi Kementerian-kementerian. Hanya saja di pihak lain, karena kelangkaan dana, pelayanan publik dilakukan seadanya, semampunya, tapi demokrasi tinggi dan otonomi daerah luas (masih dalam euforia kemerdekaan/revolusi).

1957 dibentuklah LAN (Lembaga Administrasi Negara), 1962 PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara) dan 1964 KOTRAR (Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi).

Sejak 1970-an dalam pemerintahan yang baru rasionalisasi masih tetap terus dilakukan, juga tetap dengan pemberantasan korupsi dan pungli. Dimulai dengan pembentukan Tim PAAP (Penertiban Aparatur/Administrasi Pemerintah) dan kemudian MENPAN (Menteri Negara untuk Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara). Menteri ini mengetuai “proyek efisiensi aparatur ekonomi negara dan aparatur pemerintahan”. Ada pula Opstib (operasi tertib) dan kemudian BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan). Pelayanan publik digalakkan (lagi), tapi demokrasi dikebiri (euforia pembangunan, peningkatan kesejahteraan).

1997/8 rakyat Indonesia (yang sudah jauh lebih sejahtera tetapi saat itu sedang menderita – “zaman meleset”) marah, meminta demokratisasi (lagi). Kemarahan yang gaduh itu berhasil memulai proses demokratisasi politik dan desentralisasi/otonomisasi provinsi dan kabupaten di satu pihak dan liberalisasi ekonomi di pihak lain.

Apa yang kurang? Korupsi merajalela dan pelayanan publik memburuk!

Pemerintah melakukan rasionalisasi lagi, memberantas korupsi lagi. Dibentuklah KPK dan diubahlah MENPAN menjadi MENPAN-RB (padahal dalam PAN itu sudah terkandung RB). Desentralitas dan demokrasi diperbaiki: pembagian hak-kewajiban negara, provinsi dan kabupaten serta mekanisme pemilu ditinjau-kembali dan direvisi, diperbaiki, disempurnakan.

Kehidupan bernegara yang beradab, cerdas dan sehat sudah relatif mulai terasa. Tingkat kesejahteraan dan teknologi informasi telah jauh lebih tinggi/maju dibanding 1970-an.

Sesekali masih terdengar keluhan tentang ketimpangan dan tidak tingginya kedaulatan/kemandirian ekonomi, keberpihakan/ketidaknetralan/ketidakobyektifan pejabat/pegawai negeri, dan kelambanan pelayanan publik. Tapi itu diimbangi terciptanya sistem administrasi/birokrasi bagus di beberapa kementerian, perusahaan negara, provinsi dan terutama kabupaten/kota: Takalar, Jembrana, Solok, Jogja, Solo, Surabaya, Batang, Malinau, Bantaeng, Banyuwangi, Jakarta...

Apa yang kurang? Kebaikan-kebaikan itu kurang banyak jumlahnya, kurang luas cakupan geografisnya, kurang cepat penciptaannya. *We want more!* ☺

Bacaan

Bung Hatta Anti Corruption Award, “Penerima BHACA”,
http://bunghattaaward.org/?page_id=15, 6 November 2015

Metro TV, *Mata Najwa*, Sabtu 7 Nopember 2015 (wawancara dengan Walikota Surabaya Risma dan Bupati Batang Yoyok)

Wibawa, Samodra, *Negara-negara di Nusantara, dari Negara-Kota hingga Negara-Bangsa, dari Modernisasi hingga Reformasi Administrasi*, Jogja: Gamapress 2001